



**PILIHAN PEMILIH TERHADAP CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PATI DALAM
PEMILU LEGISLATIF 2009
(di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:

Ana Wijayanti

3401405045

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Jum`at

Tanggal : 24 Juli 2009

Pembimbing I

Drs. Eko Handoyo, M.Si

NIP: 131764048

Pembimbing II

Drs. Tijan, M.Si

NIP: 131658237

Mengetahui:

Ketua Jurusan HKn

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP: 131570070

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2009

Penguji Utama

Drs. Sunarto, M.Si

NIP: 131570082

Penguji I

Drs. Eko Handoyo, M.Si

NIP: 131764048

Penguji II

Drs. Tijan, M.Si

NIP: 131658237

Mengetahui:

Dekan,

Drs. Subagyo, M.Pd

NIP: 130818771

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 24 Juli 2009

Ana Wijayanti

NIM: 3401405045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ☞ Kegagalan adalah hal yang biasa, di hari ini mungkin kekecewaan untuk kita. Kalaupun besok keberhasilan belum datang, pastikan lusa sukses kita dapatkan (Penulis).
- ☞ Hanya dengan usaha, sabar dan doa keberhasilan akan terwujud (Penulis).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa mengasihi, menjaga dan melindungiku.
2. Ayah dan ibu serta mbak Istiana dan adikku Danny terima kasih atas doa, kasih sayang dan segalanya.
3. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2005.
4. Almamaterku.

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam Pemilu Legislatif 2009”**. Penulis menyadari skripsi ini berhasil diselesaikan karena adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si., Dosen pembimbing I yang telah memberi petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Drs. Tijan, M.Si., Dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Hari Muktio, Pj. Kepala Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang telah memberikan ijin dan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
6. Warga Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang telah memberikan bantuan dalam memberikan informasi dan data-data yang diperlukan.

7. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam mengikuti perkuliahan selama ini.
8. Ayah, Ibu, mbak Istiana dan adikku Danny yang selalu menyayangi, memberikan semangat, dorongan moral dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungannya.
9. Key terima kasih buat semangat dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Angkatan 2005.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang juga telah memberikan bantuan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaiakum Wr.Wb.

Semarang, 24 Juli 2009

Penyusun

SARI

Wijayanti, Ana. 2009. *Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam Pemilu Legislatif 2009.* Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn). Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Eko Handoyo, M.Si. Drs. Tijan, M.Si. 121 Halaman.

Kata kunci: pilihan pemilih, calon anggota DPRD, pemilu legislatif

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa yang akan datang, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti yang diidealkan atau dicita-citakan bersama bahwa pemilu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Hal ini dikarenakan penentunya yaitu pemilih kurang memiliki kesadaran, pengetahuan serta analisis politik yang baik. Selain itu, disebabkan juga oleh adanya proses pemilu yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada. Sebagai salah satu contoh adalah adanya jual beli suara kepada pemilih. Pemilih bukannya diberikan hal-hal yang bersifat meningkatkan pengetahuan dan orientasi politiknya tetapi justru diberikan hal-hal yang bersifat materi.

Orientasi politik yang tidak jelas dari pemilih membuat para calon legislatif mudah dalam memberikan janji-janjinya. Hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti, terutama berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?, apakah preferensi terhadap partai politik berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan? Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, (2) mengetahui apakah preferensi terhadap partai politik berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik interaktif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. *Pertama*, faktor rasionalitas yaitu pemilih dalam menentukan pilihannya

didasarkan pada program yang ditawarkan seorang calon legislatif yang nantinya akan dipilih. *Kedua*, faktor primordialitas atau ikatan kedaerahan yaitu pemilih menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat yang berasal dari daerah yang sama dengan pemilih yaitu Desa Trangkil karena ketidakrelaan apabila anggota legislatif yang terpilih tersebut berasal dari daerah lain. *Ketiga*, mitos dan simbol yaitu pemilih tertarik untuk memilih calon legislatif yang memiliki figur kharismatik dari sebuah partai politik. Misalnya, Partai Demokrat yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono. *Keempat*, ikatan emosional yaitu pemilih dalam menentukan pilihannya tidak mudah dipengaruhi dan diubah. Ikatan emosional ini dapat timbul karena adanya hubungan kedekatan dengan pemilih. Sedangkan faktor yang *kelima* adalah *money politics*, yaitu pemilih dalam memberikan hak suaranya kepada calon legislatif pilihannya karena tertarik dengan materi yang didapatnya dari tim sukses calon legislatif yang dipilihnya tersebut. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi pilihan pemilih adalah faktor primordialitas. Mengenai preferensi terhadap partai politik yang meliputi pemahaman perkembangan partai politik, visi dan misi, profil tokoh-tokoh yang dicalonkan menjadi calon anggota legislatif oleh partai politik serta sosialisasi partai politik ternyata tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah masyarakat hendaknya dapat menentukan pilihannya dalam pemilu menjadi pemilih yang cerdas. Bagi partai politik, hendaknya senantiasa meningkatkan perannya dalam sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat agar menyadari pentingnya memberikan partisipasi politik diantaranya melalui penggunaan hak suara yang dimiliki dengan baik sehingga partai politik tidak hanya mengarah pada kemenangan partainya saja dalam pemilu. Sedangkan bagi media informasi baik cetak maupun elektronik hendaknya memanfaatkan media informasi tersebut dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kecerdasan serta kesadaran politik masyarakat dalam pemilu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah	6
F. Sistematika Skripsi.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Pemilu Legislatif	10
B. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	12
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD.....	20
D. Tinjauan tentang Partai Politik.....	31
E. Kerangka Berpikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data.....	42
G. Metode Analisis Data.....	43
H. Prosedur Penelitian	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
2. Gambaran Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.....	50
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD.....	52
4. Preferensi terhadap Partai Politik.....	58

B. PEMBAHASAN	
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD	63
2. Preferensi terhadap Partai Politik.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Persebaran jumlah penduduk Desa Trangkil	47
Tabel 2 : Persebaran penduduk menurut tingkat pendidikan	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Tips dan Trik Meraih Kursi Dewan	18
Gambar 2 : Kerangka Berpikir Penelitian.....	37
Gambar 3 : Analisis Data Kualitatif.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Ijin Penelitian di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	88
Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.....	89
Lampiran 3 : Kisi-kisi Pedoman Wawancara	90
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	91
Lampiran 5 : Daftar Nama Responden	94
Lampiran 6 : Hasil Wawancara	95
Lampiran 7 : Media Sosialisasi KPU.....	108
Lampiran 8 : Daftar Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati II Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Batangan.....	109
Lampiran 9 : Hasil Penghitungan Perolehan Suara	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai langkah awal untuk menentukan pemerintahan baru merupakan bentuk demokratisasi yang harus dilakukan oleh setiap negara yang mengaku menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan demokrasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang disebut demokrasi tanpa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Selain itu pemilu dapat dikatakan pula sebagai langkah awal untuk mewujudkan perbaikan demokrasi di Indonesia dan dianggap sebagai tahap pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi negara ini. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan akhirnya rakyat bebas untuk menjatuhkan pilihannya.

Prinsip pemilu adalah bagian dari proses kehidupan politik yang normal dalam negara yang demokratis. Sebagai bagian dari sarana demokrasi, pemilu diletakkan sebagai mekanisme untuk terciptanya pergantian kekuasaan politik secara wajar, stabil dan melembaga sesuai konstitusi. Sedangkan yang menjadi pelaku pemilu adalah semua warga negara yang secara sah ditetapkan

oleh konstitusi. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ia bebas menentukan kandidat manapun yang menjadi pilihannya. Dalam pemilu, warga negara dapat mengekspresikan hak suaranya baik berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki proses dan kualitas kehidupan demokrasi di negeri ini, pemilu legislatif patut mendapat dukungan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan saja fungsi pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan atau pemimpin nasional yang berlegitimasi, tetapi juga karena pemilu itu sendiri secara substansial membawa pesan moral agar rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang memiliki hati nurani.

Proses pemilu mau tidak mau memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya pemerintahan atau rakyat (yang diperintah). Seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD (1999:4) bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Hal inilah yang membahayakan karena yang terjadi adalah bermainnya kepentingan elit politik yang dominan di partai politik masing-masing. Bukan lagi kepentingan rakyat yang diutamakan tetapi kepentingan segelintir orang (elit politik) atau mungkin partainya agar tetap eksis.

Pemilih dengan menggunakan hak pilihnya dapat menentukan dengan hati nurani dan pemikiran jernih siapa tokoh-tokoh yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memperjuangkan aspirasinya. Partai politik

dengan berbagai perangkat yang dimilikinya dapat menseleksi siapa saja yang akan dicalonkan, tentunya dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh mekanisme internal partai dan juga memberikan pendidikan politik kepada para anggotanya untuk mempersiapkan supaya siap dipilih dalam proses sirkulasi kepemimpinan baik di partai maupun di tataran jabatan politik. Dapat dibayangkan apabila masyarakat memilih orang-orang yang salah, yang terjadi adalah hukum bisa digunakan sebagai sarana kekuasaan politik dominan oleh elit politik atau partai politik yang berkuasa. Banyak orang yang beranggapan bahwa dunia politik merupakan dunia yang penuh dengan "misteri". Sebuah panggung yang penuh dengan adu kekuatan. Tempat orang-orang bergelut untuk meraih, mempertahankan serta memperluas kekuasaan. Tentunya ini membawa implikasi tersendiri bagi para kontestan, yaitu bahwa mereka yang tidak mampu bersaing secara otomatis akan tersingkir dari percaturan politik.

Pernak-pernik pemilu bukan hanya bendera, spanduk, kaos atau slogan tetapi juga program partai politik yang selalu digemakan oleh juru kampanye (jurkam) masing-masing partai politik. Sama halnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, awal tahun 2009 adalah musim obral janji untuk mencapai tujuan apapun dilakukan yang semua membuai rakyat. Rakyat sebagai pemilih pun terbuai dengan angan-angan dan janji-janji yang tidak pasti, tanpa analisis proses berfikir yang mendalam dengan melihat pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Menjelang hari-H, sudah banyak calon legislatif yang melakukan tebar pesona. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para calon anggota legislatif untuk meyakinkan

calon pemilih dengan mencuri perhatian mereka. Pasalnya, jumlah suara pemilihlah yang akan menentukan langkah mereka menuju kursi legislatif.

Dalam masa menjelang pemilu terjadi hal unik yang dilakukan oleh para politisi sama dengan pemilu sebelumnya, mereka berkomunikasi dengan rakyat menjelang hari pemilihan umum. Demikian pula para calon anggota legislatif yang tiba-tiba rajin mengunjungi beberapa daerah untuk mendekati masyarakat pemilih padahal sebelumnya mereka tidak berminat untuk mengetahui dan memahami tempat tersebut. Bukan rahasia lagi, rakyat selama ini hanya didekati setiap menjelang pemilu. Setelah terpilih duduk di lembaga legislatif, para wakil rakyat tersebut ibarat kacang lupa pada kulitnya.

Berbicara mengenai keberhasilan pemilu tidak semata-mata menjadi peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau segolongan orang atau kelompok saja melainkan kerja seluruh rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya proses pemilu 2009 tidak seperti yang diidealkan, dapat kita temui masih adanya *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses pemilu partai politik tertentu di tingkat desa atau berusaha menjatuhkan partai politik lain baik dengan cara lisan maupun tertulis.

Belajar dari pemilu sebelumnya, seharusnya pemilu legislatif 2009 menjadi pemilu yang *elegant* dan bermartabat dimana partai politik dan elit politik harus bermain *fair play* (siap menang, siap kalah) tanpa adanya kerusuhan, *money politic*, curi *start* kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye baik personal maupun partai bagi anggota atau elit politik yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Partai politik sesuai fungsinya harus memberikan pendidikan politik bukan pembodohan melalui janji-janji politik hanya karena kekuasaan dan keuntungan materiil yang diperolehnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “PILIHAN PEMILIH TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 (di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”.

B. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Apakah preferensi terhadap partai politik berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

2. Mengetahui apakah preferensi terhadap partai politik berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan umum karena suaranya begitu penting untuk kemajuan bangsa dan negara.

2. Bagi peneliti

Meningkatkan kemampuan peneliti dalam meneliti fenomena politik khususnya kondisi partisipasi politik masyarakat yang nantinya menjadi tolok ukur keberhasilan pemilihan umum serta memberikan pengetahuan dan informasi baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati khususnya dalam pemilu legislatif 2009.

E. Batasan Istilah

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi berbagai salah tafsir mengenai judul penelitian ini, arah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas maka perlu untuk memberikan batasan penegasan judul yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pemilih

Yang dimaksud pemilih seperti apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih diartikan sebagai kelompok masyarakat yang menurut Undang-Undang merupakan para warga yang sah dan berhak memberikan suara sewaktu pemilihan umum (Firmanzah, 2008:221). Pemilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang telah memenuhi syarat untuk menentukan pilihannya atau memilih calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini membahas dalam tataran DPRD Kabupaten Pati.

3. Pemilu Legislatif 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan tahun 2009.

F. Sistematika Skripsi

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi, perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. Bagian pendahuluan.

Halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman prakata, halaman sari, halaman daftar isi,

halaman daftar tabel, halaman daftar gambar serta halaman daftar lampiran.

2. Bagian isi.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, terdiri atas landasan teori atau konsep-konsep untuk mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri atas dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahaan data, metode analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN, terdiri atas simpulan dan saran.

3. Bagian akhir.

Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Pemilu Legislatif

Pemilu adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Demokrasi modern atau demokrasi tidak langsung di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakanlah pemilu. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syahrial Syarbaini, 2002:80). Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Dalam konteks sistem politik, pemilu mengandung tiga pranata secara keseluruhan yang menghubungkannya dengan demokrasi (Dawam, 1996:20 dalam Martien Herna, 2007:54), yaitu:

1. persaingan, yakni apakah setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat;
2. peran serta politik (partisipasi politik), yakni rakyat ikut serta dalam proses seleksi wakil atau pemimpin mereka dan memilih mereka sebagai pemimpin untuk semuanya;
3. kebebasan politik dan kebebasan sipil yang diwujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan

berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan peran serta. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi aktualisasi asas kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan yang lebih berkualitas. Para calon anggota DPRD sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan.

Semangat demokrasi dalam pemilu legislatif 2009 tampak dalam asas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 1) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.
- 2) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara

tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

- 3) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- 4) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.
- 5) Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Adil, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian dewan, perwakilan, rakyat dan daerah diartikan secara terpisah.

Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dan lain-lain dengan jalan berunding.

Perwakilan adalah segala sesuatu tentang wakil, seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.

Rakyat adalah segenap penduduk suatu negara (sebagai pengemban pemerintah).

Daerah adalah lingkungan pemerintah, kawasan, tempat-tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu wilayah (kota, kabupaten, provinsi, negara dan sebagainya).

Jadi, yang dimaksudkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dengan jalan berunding dan mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama segenap penduduk di lingkungan pemerintah wilayah kabupaten atau provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji (Markus Gunawan, 2008:170). Calon

anggota legislatif tersebut diusung oleh partai-partai politik peserta pemilu. Partai politik selalu memiliki persediaan calon-calon anggota untuk duduk di lembaga legislatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
2. fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah; dan
3. fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu dijelaskan pula mengenai tugas dan wewenang DPRD, antara lain:

- 1) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- 5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- 10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- 11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka DPRD diberi beberapa hak yaitu:

1. interpelasi, yang dimaksud dengan hak interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;

2. angket, yang dimaksud dengan hak angket dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; serta
3. menyatakan pendapat, yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

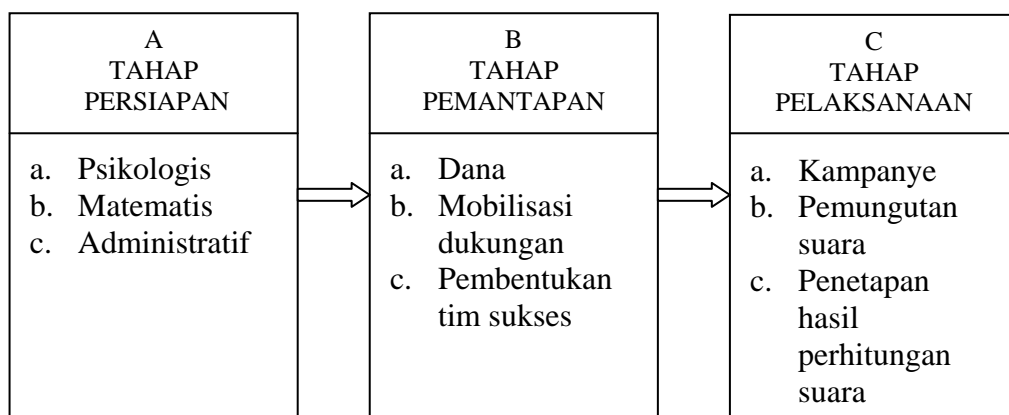
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 5) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;

- 6) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 7) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 8) sehat jasmani dan rohani;
- 9) terdaftar sebagai pemilih;
- 10) bersedia bekerja penuh waktu;
- 11) mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- 12) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

- 13) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 14) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- 15) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- 16) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Disadari atau tidak orang-orang yang telah dipilih dan berkuasa di pemerintahan baik dalam arti sempit maupun luas menentukan semua kebijakan. Untuk mempertahankan kekuasaan, para elit politik membentuk partai politik atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Suatu partai politik dalam negara demokrasi digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yaitu dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Para politisi partai politik berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan pada pemilu dalam rangka perebutan jabatan publik seperti menjadi anggota DPRD. Markus Gunawan (2008:199) mengungkapkan tips dan trik untuk meraih kursi dewan yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Tips dan Trik Meraih Kursi Dewan

Keterangan:

A. TAHAP PERSIAPAN

a. Psikologis

1. kesungguhan menjadi anggota dewan,
2. memahami konsekuensinya,
3. memilih partai politik yang sesuai,
4. memilih provinsi yang potensial (DPD),
5. merumuskan visi dan misi,
6. fokus pencapaian visi dan misi.

b. Matematis

1. mengukur popularitas,
2. memetakan kekuatan lawan,
3. memahami daerah pemilihan,
4. menghitung kemungkinan meraih kursi.

c. Administratif

1. memenuhi persyaratan yang ditetapkan,
2. terdaftar sebagai pemilih,
3. terdaftar sebagai anggota partai politik (DPR, DPRD),
4. memenuhi persyaratan dukungan (DPD),
5. mengikuti seleksi bakal calon,
6. terdaftar sebagai calon sementara,
7. ditetapkan sebagai calon tetap.

B. TAHAP PEMANTAPAN

a. Dana

1. dana pribadi,
2. sponsorship (buka rekening bantuan),
3. bantuan lain yang tidak mengikat.

b. Mobilisasi dukungan

1. massa akar rumput,
2. organisasi massa, organisasi keagamaan, organisasi profesional dan paguyuban,
3. orang-orang terdekat (keluarga, teman dan tetangga).

c. Pembentukan tim sukses

1. mengundang para profesional,
2. memanfaatkan jasa konsultan politik,
3. mengaktifkan peran kaum muda,
4. melakukan riset dan survei,
5. pembekalan saksi,
6. analisis strategi kampanye.

C. TAHAP PELAKSANAAN

a. Kampanye

1. penggunaan materi kampanye,
2. pemanfaatan media kampanye,
3. memahami aturan kampanye,
4. membangun jaringan dan pencitraan.

b. Pemungutan suara

1. pastikan pemilih potensial tidak berpaling,
2. penyebaran saksi,
3. mengunjungi TPS-TPS,
4. rekapitulasi hasil perhitungan suara,
5. awasi kemungkinan adanya kecurangan.

c. Penetapan hasil perhitungan suara

1. berjiwa besar (siap menang siap kalah),
2. ajukan gugatan jika terjadi kecurangan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Partai yang akan memenangkan pemilu secara teoritis adalah partai yang dapat menjangkau wilayah Indonesia yang luas serta dapat mencakup masyarakat Indonesia yang beragam. Partai yang hanya kuat di pulau tertentu atau kelompok masyarakat tertentu misalnya, akan sulit untuk memenangkan pemilu.

Firmanzah (2008:221) mengungkapkan bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya sedikit banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh hal-hal tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada dua dimensi dan karakteristik pemilih, yaitu rasionalitas dan tradisionalitas.

1. Rasionalitas pemilih

Dalam hal ini mengelompokkan rasionalitas dalam tiga hal, yaitu proses, metode dan isi (*content*). Proses melihat bahwa rasionalitas akan terjadi apabila si individu atau kelompok menggunakan tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pengambilan

keputusan melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, analisis situasi, penyusunan solusi, memilih solusi dan implementasinya. Semakin lengkap tahapan yang dilalui sewaktu mengambil keputusan, semakin rasional pula individu yang bersangkutan.

Pemahaman kedua mengenai rasionalitas adalah dari sisi metodenya. Rasional juga berarti mempergunakan kalkulasi. Masing-masing individu diasumsikan memiliki kepentingan (*interest*) tertentu dan sebagai makhluk rasional dia berusaha memaksimalkan kepentingannya. Untuk itu, ia akan menjatuhkan pilihannya pada sesuatu yang akan memberikan keuntungan maksimal melalui beberapa perhitungan. Semakin kalkulatif dan memaksimalisasi kepentingannya, semakin rasional pula individu tersebut.

Ketiga, rasionalitas pemilih juga dapat bersumber dari isi atau muatan yang menjadi pertimbangannya sewaktu proses pengambilan keputusan. Muatan yang rasional adalah hal-hal yang dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dibuktikan secara empiris dan logis. Pemilih rasional akan melibatkan hal-hal tersebut dalam mengambil keputusannya. Di bawah ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pemilih yang merupakan karakteristik pemilih rasional.

a. Arah kebijakan politik

Rasionalitas pemilih dapat dilihat dari seberapa intens ketertarikan pemilih terhadap arah kebijakan politik yang diusung oleh para kandidat atau partai politik. Arah kebijakan politik dalam hal ini

diartikan sebagai keseluruhan ide, gagasan dan program para kandidat untuk membawa masyarakat menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Arah kebijakan politik tidak boleh hanya bersifat internal, karena bagi para pemilih menjadi kurang begitu penting apabila arah kebijakannya asyik dengan diri sendiri. Sebaliknya, pemilih justru akan mengevaluasi pesan dari program politik yang terkait dengan kehidupan mereka di kemudian hari. Para kandidat harus menunjukkan kemampuan dalam mengolah program yang mudah dicerna dan jelas, sehingga akan memudahkan pemilih dalam mengevaluasi masyarakat seperti apa yang akan dibentuk oleh kandidat tersebut.

Pemilih yang rasional akan memandang semua ini penting untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya. Tentunya arah kebijakan politik dari kandidat atau partai politik harus memiliki kedekatan dengan pemilih. Semakin dekat arah kebijakan politik itu dengan realitas yang dihadapi dalam kehidupan mereka, pemilih akan semakin cenderung memilihnya.

b. Solusi yang ditawarkan

Pemilih rasional juga sangat perhatian terhadap solusi yang ditawarkan kandidat atau partai politik. Tentunya analisis terhadap solusi ini diawali dengan tawaran pemecahan atas permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Pemilih akan melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang coba diungkapkan dan diselesaikan oleh kandidat. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat terdapat banyak

sekali dan beragam permasalahan yang dihadapi. Mulai permasalahan ekonomi, sosial-budaya, politik, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesejahteraan serta kesehatan. Misalnya, dalam kondisi krisis ekonomi masalah-masalah seperti pengangguran, berkurangnya investasi, berkurangnya daya saing negara serta berkurangnya kesejahteraan masyarakat menjadi tema penting untuk segera mendapatkan solusinya.

Mengungkapkan permasalahan barulah langkah awal. Hal ini sekadar untuk menunjukkan kepedulian kandidat atau partai politiknya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pengungkapan ini belum cukup karena masyarakat masih menunggu solusi seperti apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Pemecahan atas permasalahan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pemilih rasional. Pemilih akan mencari manakah kiranya solusi yang terbaik bagi mereka dan dapat membawa masyarakat ke kondisi yang lebih baik.

c. Kalkulatif dan logis

Karakteristik mendasar dari para pemilih rasional adalah mendasarkan pertimbangan politik mereka pada logika. Semua hal yang keluar dari pernyataan kandidat atau partai politik mereka analisis secara logis (logis dalam hal ini diartikan sebagai proses kognitif yang mengandung analisis substansial sedangkan faktor-faktor yang menyusun analisis logis adalah hal-hal seperti kelayakan, dapat

diaplikasikan, dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan). Pemilih tidak terlalu memperhatikan dan peduli terhadap hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan nalar manusia. Bagi mereka, permasalahan politik dan sosial masyarakat adalah permasalahan riil dan nyata. Oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian yang riil dan logis pula. Sebagai konsekuensinya, kandidat atau partai politik yang dianggap kurang mampu menunjukkan argumen dan bukti-bukti mengenai solusi yang mereka tawarkan pun niscaya tidak akan dipilih.

d. Ikatan rasional

Ikatan rasional ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, ikatan rasional bersifat sementara. Artinya, para pemilih rasional hanya memberikan dukungan kepada seorang kandidat sejauh dianggap sesuai dengan harapan mereka. Seorang kandidat yang melanggar janji akan membuat mereka tidak mempunyai cukup banyak alasan untuk mempertahankan hubungan mereka dengannya. Dengan kata lain, pemilih akan berpindah dan mencari kandidat yang sesuai dengan harapan mereka.

Kedua, pemilih rasional adalah pemilih yang kritis. Mereka tidak hanya berhenti menuntut kandidat untuk menguak berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat melainkan juga harus memiliki cara pemecahannya. Strategi dan program kerja kandidat akan dievaluasi untuk melihat kelayakannya.

Ketiga, pemilih cenderung berubah dan tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap partai politik atau kandidat tertentu. Mereka bergerak bebas tanpa ikatan serta menunggu kandidat atau partai politik yang sesuai dengan harapan mereka.

2. Tradisionalitas pemilih

Pemilih dalam hal ini lebih banyak menggunakan faktor non-rasional dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan suaranya. Masyarakat lebih menekankan aspek yang mereka rasakan daripada pertimbangan logis. Dunia politik tidak seluruhnya bersifat rasional dan logis.

Fanatisme pemilih atas suatu partai politik atau kandidat tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang rasional. Misalnya, sikap yang bahkan rela mati demi suatu partai politik atau kandidat adalah sikap yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Padahal justru hal-hal seperti inilah yang seringkali kita temukan dalam kehidupan politik. Di bawah ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pemilih yang merupakan karakteristik pemilih tradisional.

a. Mitos dan simbol

Pemilih tradisional lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat mitos. Berkembangnya mitos dapat dari mulut ke mulut atas suatu peristiwa, kejadian atau situasi yang melibatkan seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Dari peristiwa tersebut dimunculkan narasi-narasi tentang aspek kepahlawanan (*heroik*) orang atau kelompok

tertentu. Dari situ, sosok individu yang bersangkutan diyakini kelompok tertentu sebagai orang yang memiliki kekuatan superior.

Mitos tumbuh dan berkembang karena digunakannya simbol-simbol yang menopang mitos tersebut. Simbol-simbol ini merupakan instrumen yang mutlak harus ada agar mitos bersangkutan tetap terjaga. Adakalanya simbol-simbol itu sengaja diciptakan agar mitos yang terkait tetap menjadi buah bibir dan dipercayai kebenarannya dalam masyarakat. Dengan adanya mitos ini, masyarakat dibuat untuk melihat si individu memiliki sifat dan kemampuan yang melebihi manusia normal sehingga menarik untuk dipilih. Misalnya, orang yang dituakan, kharismatik merupakan manifestasi berlakunya mitos dan simbol di ranah politik.

Dalam budaya Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa sebagai suku mayoritas mitos akan Satrio Piningit selalu hidup dan terus menjadi harapan bangsa ini. Padahal kriteria seseorang untuk bisa disebut sebagai Satrio Piningit tidaklah jelas. Masing-masing orang atau kelompok mendefinisikan Satrio Piningit dengan cara yang berbeda-beda dan sulit dibuktikan kapan serta bagaimana ia akan datang menyelamatkan bumi Indonesia. Akibatnya banyak individu yang mengklaim dirinya sebagai Satrio Piningit. Mereka sadar apabila masyarakat melihat bahwa individu tersebut adalah Satrio Piningit mereka akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Mengingat mitos Satrio Piningit terus hidup dalam perspektif

masyarakat Indonesia dapat dimengerti apabila tokoh ini dijadikan basis legitimasi yang merupakan sumber kekuatan untuk menarik dukungan dari masyarakat luas.

b. Garis primordialisme

Garis primordial juga merupakan salah satu indikasi tradisionalisme pemilih. Alih-alih melihat kompetensi, pengetahuan dan keahlian kandidat, pemilih lebih mengutamakan kandidat yang memiliki hubungan darah dengan orang yang mereka hormati atau berasal dari daerah yang sama dengan para pemilih.

Alhasil, eksistensi kandidat atau pemimpin partai politik tidak hadir karena dirinya sendiri, melainkan karena melekat dengan struktur-struktur yang membungkusnya, sehingga kehadiran dan eksistensinya lebih ditentukan oleh anak siapa atau cucu siapakah dia. Pemilih lebih melihat bahwa garis keturunan adalah sistem terbaik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin unggul dan bukannya langkah pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dalam organisasi. Kenyataan bahwa mereka memiliki garis kekerabatan dengan orang yang dihormati atau pemimpin masa lalu sudah cukup untuk menjadi jaminan bahwa yang bersangkutan mewarisi gen-gen kepemimpinan yang dimiliki leluhurnya.

c. Afektif

Pemilih tradisional juga dicirikan oleh pertimbangan afektif yang mendominasi dalam pengambilan keputusan. Perasaan suka atau

tidak suka merupakan salah satu indikasi adanya proses afektif ini. Proses ini lebih didasari pengalaman individu pemilih di masa lalu atau stereotipe yang berkembang dalam masyarakat. Pemilih lebih melandaskan diri mereka pada kondisi emosi dibandingkan dengan logika. Mereka akan mendukung suatu partai atau seorang kandidat yang mereka sukai meskipun mereka sadar tentang adanya partai atau kandidat lain yang lebih baik.

Yang ditekankan di sini bukanlah aspek logika dan rasio untuk menyelesaikan permasalahan melainkan bagaimana masyarakat dapat merasakan dan seolah-olah mengalami sendiri penderitaan yang dialami bangsanya. Sehingga partai politik tersebut akan mendapatkan dukungan dan simpati yang luas dari masyarakat.

d. Ikatan emosional

Bertolak belakang dengan ikatan rasional, ikatan emosional bersifat lebih dalam dan stabil. Ikatan ini tidak mudah dipengaruhi dan diubah. Program-program kampanye pemilu yang paling bagus pun sulit sekali menarik perhatian pendukung kandidat atau partai lain yang memiliki ikatan emosional kuat.

Ketika seseorang begitu mengidolakan suatu partai politik atau kandidat dia akan siap melakukan apa saja demi idolanya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa ikatan emosional lebih bersifat stabil dan tidak mudah digoyahkan oleh pesaing politik, bahkan ketika keadaannya menjadi kacau dan merugikan. Namun, ikatan emosional antara suatu

partai politik dengan masyarakat juga dapat memunculkan suatu *image* tertentu dalam benak masyarakat. Perasaan senang, kecewa dan sedih seringkali muncul dalam hubungan antara partai politik dengan masyarakat. Ketika harapan besar diberikan oleh masyarakat kepada suatu partai politik, namun realisasi harapan masyarakat tersebut tidak kunjung datang sudah dapat dipastikan bahwa partai politik tersebut akan menuai panen dari benih-benih kekecewaan yang mereka taburkan di masyarakat. Dengan kekecewaan ini, *image* yang akan muncul adalah *image* kekecewaan.

Pendapat lain menyatakan bahwa secara garis besar perilaku pemilih, dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, penentuan pilihan karena kesamaan ideologi dengan kandidat. Ideologi disini adalah ide-ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan masyarakat seperti apa yang ingin dibangun, termasuk bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ideologi ini menjadi pedoman dan pegangan partai dalam menjalankan kebijaksanaan dan perilaku para kader atau anggota. Terlalu berat bagi pemilih harus memahami ideologi. Karena itu, dalam kehidupan Indonesia sekarang dengan politik aliran yang semakin cair, ideologi agaknya tidak lagi menjadi faktor penentu. Selain itu, kurang memadainya komunikasi politik antara partai dan calon anggota legislatif sangat sulit bagi pemilih untuk menemukan garis persamaan ideologis. Apalagi dengan pragmatisme politik yang demikian kuat.

Kedua, pilihan didasarkan pada afiliasi partai politik. Karena ikatan emosional pemilih yang kuat terhadap suatu partai politik, tanpa memperhatikan siapa calon yang disodorkan pemilih memilih calon yang didukung partai politik pilihannya. Pemilih yang berperilaku seperti ini agaknya lebih banyak. Apabila diperhatikan di beberapa daerah, meskipun sosialisasi bahwa pada pemilihan umum nanti pemilih menentukan pilihannya dengan memilih nama, namun masih terlihat atribut-atribut partai yang dipasang di beberapa sudut kampung dan rumah penduduk. Fenomena itu menunjukkan bahwa ikatan masyarakat terhadap partai tertentu masih cukup kuat. Pada kondisi seperti itu, citra partai lebih dipentingkan daripada citra individu calon. Oleh karena itu, para kandidat berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh dukungan partai politik sebesar mungkin.

Ketiga, pilihan karena kesamaan etnisitas atau unsur primordialisme lainnya, seperti kesamaan asal kelahiran. Banyak yang mengasumsikan, variabel ini turut menentukan pilihan politik seseorang.

Keempat, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. Pragmatisme ini bisa muncul karena banyak hal, seperti politik uang. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk yang agak *soft* agar tidak dikesankan "membeli" suara seperti bantuan sembako, pembangunan masjid dan sebagainya. Pragmatisme politik akan melahirkan pemimpin yang inferior. Apabila kandidat berhasil menjadi anggota legislatif misalnya, ia akan merasa inferior dibandingkan lembaga eksekutif. Akibatnya, sadar akan

kekurangannya dari segi pengalaman atau pendidikan misalnya, mereka akan merasa gamang ketika tiba-tiba harus memainkan perannya sebagai anggota legislatif. Padahal, saat ini peran lembaga ini begitu dominan di Indonesia. Hampir semua keputusan penting, mulai dari pembuatan undang-undang hingga penunjukan direktur utama perusahaan harus atas persetujuan lembaga legislatif.

Faktor kelima adalah pilihan karena program dan integritas kandidat. Pemilih yang rasional biasanya melihat sisi ini sebagai pertimbangan dalam memilih calon. Namun, diperkirakan tidak banyak pemilih yang menggunakan hal ini sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan.

Memang dimungkinkan, pilihan ditentukan juga karena kombinasi dan perpaduan dari beberapa unsur di atas, namun pemilih yang cerdas seharusnya didasarkan pada rekam jejak kandidat, integritas, keahlian dan program yang ditawarkan. Akan tetapi, pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar isapan jempol akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis. Belum lagi adanya anggapan, siapa pun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan yang signifikan (Aruman, 2009).

D. Tinjauan tentang Partai Politik

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Di negara demokrasi, gagasan

mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Miriam Budiardjo (2008:397) berpendapat bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Miriam Budiardjo, 2004:160). Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Rahman, 2007:102). Carl J. Friedrich memberi pengertian tentang partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Miriam Budiardjo, 2004:161).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan secara khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan partai politik menjadi landasan bagi berfungsinya partai politik. Hal ini tampak dalam fungsi partai politik seperti yang diungkapkan Miriam Budiardjo (2004:163) bahwa dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi.

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik antara lain dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan *image* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui

ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.

3. Partai politik sebagai rekrutmen politik, yaitu partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*), yaitu dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga menjelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia;
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

E. Kerangka Berpikir

Seperti apa yang telah diuraikan dalam landasan teori bahwa masyarakat memiliki peran penentu dalam sirkulasi kepemimpinan negara. Peran dalam menentukan proses pergantian ini merupakan wujud dari demokrasi yang paling hakiki. Masyarakat mempunyai kewenangan yang sebesar-besarnya tanpa adanya paksaan dalam menempatkan orang-orang yang dianggap dapat memperjuangkan keinginan dan nasib hidupnya di pemerintahan untuk mendapatkan kesejahteraan. Wujud riil dari keikutsertaan dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin adalah ikut serta memilih dalam pemilihan umum.

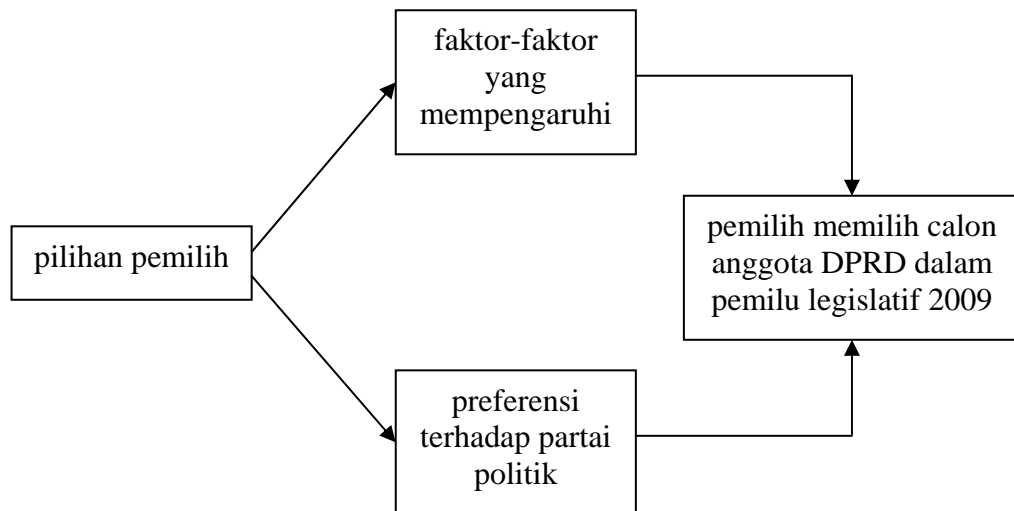
Pemilihan umum merupakan ciri yang paling tampak dalam sistem demokrasi. Dimana pemilih memiliki hak untuk memilih calon-calon pemimpin dan dijamin oleh Undang-Undang dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum diikuti oleh partai politik sebagai peserta pemilu yang memiliki fungsi penting dalam perkembangan pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara umum. Selain untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki fungsi yang begitu kompleks, yang intinya partai politik diharapkan mampu menjadi wadah untuk mendidik masyarakat atau calon-calon pemimpin bangsa agar siap dengan moralitas yang tinggi serta sanggup mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin. Memahami masyarakat tentang politik adalah proyek besar yang harus berlangsung terus menerus tanpa putus, sehingga masyarakat memiliki orientasi dalam kehidupan politik bukan hanya

sebagai penonton saja yang hanya ada di luar tanpa mau ikut serta menentukan kebijakan yang arahnya kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Calon-calon anggota legislatif diharapkan mampu berkarya dan memperjuangkan aspirasi masyarakat jika terpilih dan sesuai dengan Undang-Undang bahwa partai politik atau calon tersebut secara hukum sah untuk mewakili masyarakat yang memilihnya. Wakil-wakil inilah yang nantinya menentukan kebijakan dari berbagai aspek dan kebijakan itu akan kembali kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibuat. Kebijakan yang telah dibuat apakah sudah mencerminkan kepentingan masyarakat atau belum dinilai oleh masyarakat itu sendiri. Rakyat kemudian memberikan evaluasi, apakah wakil-wakil yang telah dipilih telah melaksanakan tanggung jawab yang diberikan atau belum yaitu memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat yang memilihnya.

Dalam menentukan pilihannya masyarakat baik individu maupun kelompok dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada sejumlah alasan yang dipakai oleh pemilih ketika memilih calon anggota DPRD. Hal inilah yang terjadi dalam realitas masyarakat Indonesia ketika menjelang pemilihan umum, ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka berpikir penelitian yang akan dilaksanakan ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2: Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana pendekatan penelitian kualitatif perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasar dari teori konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. Data deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62).

Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif dalam membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Hal itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data secukupnya yang mengarahkan seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya.

Berdasarkan konsep di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati serta faktor yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi pilihan pemilih.
2. Pengaruh preferensi pada partai politik terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan.

D. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2006:129). Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002:112).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihimpun dari dua sumber.

- 1) Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari masyarakat Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mempunyai hak pilih aktif pada pemilu legislatif 2009.
- 2) Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen di Kantor Kepala Desa Trangkil yang berkaitan dengan data pemilu legislatif 2009 serta kondisi aktual lokasi penelitian. Data sekunder ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang lebih luas bagi peneliti sehingga hasil penelitian akan lebih akurat.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian maka diperlukan pengumpulan data sebanyak mungkin dan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135).

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa ucapan, pikiran serta gagasan. Dengan wawancara diharapkan informasi tentang penelitian ini dapat terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat serta memperoleh informasi yang ada dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

2. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006:156). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, maka peneliti terjun ke lapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemilu legislatif 2009.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data (Moleong, 2002:178). Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331 dalam Moleong, 2002:178).

Teknik triangulasi menurut Patton dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

- 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan serta
- 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelimanya untuk membandingkan, peneliti hanya menggunakan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, sumber data berasal dari pedoman wawancara dibandingkan antara pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara itu sendiri dengan tujuan untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap; dan (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dengan melaksanakan interaksi data. Menurut Miles dan Huberman data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaktif. Langkah-langkah model interaktif meliputi empat aktivitas.

1. Pengumpulan data, dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data

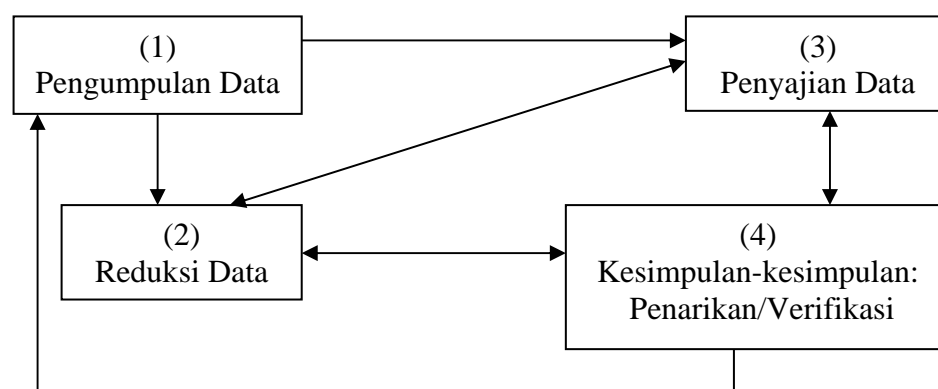
dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi data (*data reduction*), reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data (*data display*), penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks.
4. Verifikasi data (*conclusion drawing*), verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya (Miles dan Huberman, 1992:15-19).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi dan

wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Oleh karena banyaknya data yang terkumpul, maka diadakan reduksi data setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan atau verifikasi.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai metode analisis tersebut, Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3: Analisis Data Kualitatif

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi tiga tahap.

1. Tahap pra penelitian, yaitu menetapkan dan merumuskan permasalahan kemudian menyusun rancangan penelitian, membuat instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. Menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan masukan dan arahan peneliti berkonsultasi dengan pembimbing.

2. Tahap penelitian, diantaranya menghubungi responden awal untuk mendapatkan masukan, menentukan responden dibarengi dengan observasi dan wawancara, mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan objek yang menjadi fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga dapat memberikan hasil yang akurat terhadap kejelasan suatu objek yang diteliti.
3. Tahap pasca penelitian, dalam tahap ini peneliti mengolah data yang diperoleh dari lapangan, menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal penting yang harus diketahui oleh peneliti.

a. Jumlah penduduk

Jumlah seluruh penduduk Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berjumlah 10.149 jiwa, sedangkan jumlah pemilih untuk pemilu legislatif 2009 sebanyak 8.565 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persebaran jumlah penduduk Desa Trangkil

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.911 jiwa
2.	Perempuan	5.238 jiwa
Total		10.149 jiwa

Sumber: Data demografi Desa Trangkil laporan bulanan bulan Maret 2009

b. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah 273 Ha.

c. Keadaan sosial budaya

1) Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dapat dikatakan relatif kompleks, perbedaan itu disebabkan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang berbeda-beda. Pekerjaan penduduk Desa Trangkil diantaranya sebagai petani, buruh tani, pedagang, buruh bangunan, PNS, karyawan pabrik dan lain-lain.

2) Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan kemajuan suatu daerah. Selain itu, pendidikan juga berpengaruh dalam membentuk pola pikir masyarakat. Hal ini berpengaruh pula terhadap pandangan masyarakat Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh maka semakin luas pula pola pikirnya dan begitu juga sebaliknya. Persebaran penduduk Desa Trangkil menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persebaran penduduk menurut tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan tinggi	371 jiwa
2.	Lulus SMA	1.601 jiwa
3.	Lulus SMP	1.304 jiwa
4.	Lulus SD	2.824 jiwa
5.	Tidak lulus SD	2.326 jiwa
6.	Tidak sekolah	1.723 jiwa
Total		10.149 jiwa

Sumber: Data demografi Desa Trangkil laporan bulanan bulan Maret 2009

3) Agama

Agama Islam adalah agama yang dianut sebagian besar masyarakat Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Selain itu, ada juga masyarakat yang beragama non-muslim namun hanya sebagian kecil saja.

4) Batas wilayah

Batas-batas wilayah Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sebagai berikut:

sebelah utara : Desa Karanglegi

sebelah timur : Desa Jatimulyo

sebelah selatan : Desa Kajar

sebelah barat : Desa Pasucen

2. Gambaran Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009

Pemilu legislatif merupakan pesta demokrasi bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD sesuai hati nurani rakyat untuk memilih secara langsung, bebas, rahasia dan tanpa paksaan dari siapa pun. Secara umum masyarakat Desa Trangkil berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2009 baik aktivitas-aktivitas politik menjelang pemilu seperti mengikuti kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemungutan suara yaitu datang langsung ke TPS. Masyarakat ingin memberikan suara kepada tokoh-tokoh calon-calon wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif yang menjadi pilihannya. Pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan secara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 dari jam 07.00 sampai dengan 12.00 WIB yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari 38 TPS.

Pemilu legislatif 2009 yang diikuti 38 parpol nasional dan 8 parpol lokal (khusus NAD) dengan aliran-aliran politik yang berbeda-beda, sehingga total keseluruhan berjumlah 44 (empat puluh empat) buah partai politik dalam rangka mengikuti pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009. Berbeda dengan pemilu 2004, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu tanggal 9 April 2009 bagi para pemilih untuk memberikan hak suaranya dalam rangka kegiatan hak pilihnya dilakukan dengan memberikan tanda atau menandai

(mencontreng) dengan tanda (✓). Saat datang ke TPS, setiap pemilih akan mendapatkan empat surat suara yang masing-masing berwarna kuning, biru, hijau dan merah. Surat suara warna kuning untuk memilih calon legislatif DPR-RI, surat suara warna biru untuk memilih calon legislatif DPRD Provinsi, surat suara warna hijau untuk memilih calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota dan surat suara warna merah untuk memilih calon anggota DPD. Ukuran surat suara yang cukup besar, mencapai 54 cm x 84 cm memang akan sedikit meyulitkan untuk melakukan pencontrengan saat berada di bilik suara. Selama kurang lebih lima menit waktu yang dibutuhkan untuk memilih dan mencontreng keempat surat suara tersebut. Hal ini nantinya sangat menentukan baik buruknya anggota legislatif yang akan duduk di kursi dewan untuk mewakili masyarakat selama lima tahun ke depan.

Pelaksanaan pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil dapat dikatakan sukses, aman, tertib dan lancar. Artinya pelaksanaan pemilu ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suksesnya pemilu legislatif 2009 bukan hanya dilihat dari terselenggaranya teknis penyelenggaraan pemilihan umum atau pergantian jabatan anggota legislatif. Namun, lebih dari itu adalah harapan terhadap arah perubahan masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Pemilu legislatif 2009 menjadi pertarungan bagi masyarakat untuk percaya kepada siapapun, agar yang terpilih nantinya dapat membawa angin segar dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini

menjadi pembuktian yang akan mengantarkan demokrasi kita kepada kesejahteraan. Sehingga pilihan itu, seharusnya menjadi pilihan sadar dari masyarakat karena pemilu adalah sebuah keputusan untuk menjatuhkan pilihan kepada calon wakil-wakil rakyat yang dapat membawa dan melaksanakan aspirasi masyarakat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD

Pemahaman arti demokrasi yang semakin luas di kalangan masyarakat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika politik bangsa. Dalam kehidupan masyarakat selalu ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam setiap mengambil keputusan untuk memilih calon-calon wakil rakyat dalam hal ini memilih calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009.

Berkaitan dengan pemilu legislatif 2009 yang dilaksanakan di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati. Ketika menjelang pemilu, para kontestan pemilu menawarkan program dan kebijakan politik yang akan dilakukan ketika kandidat tersebut terpilih. Mereka menjanjikan berbagai hal untuk mendapatkan dukungan rakyat. Meskipun tidak semua yang dijanjikan

tersebut dipenuhi, namun sedikit banyak hal ini ikut mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Hal ini seperti diungkapkan oleh Imam Supeno (35 tahun) sebagai berikut.

“Yang menjadi pertimbangan saya memilih caleg pilihan saya adalah janji-janji politik pada saat kampanyenya, yang menurut saya memiliki kemampuan dengan program yang ditawarkannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, karena ini merupakan salah satu yang menjadi permasalahan dalam masyarakat Kabupaten Pati dan perlu mendapatkan perhatian khusus” (wawancara tanggal 10 April 2009).

Pendapat Bapak Imam Supeno tersebut menyatakan bahwa dia memilih calon legislatif pilihannya dengan melihat program yang ditawarkan calon legislatif yang dianggapnya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, karena hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam masyarakat Kabupaten Pati yang cukup meresahkan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintahan.

Pemilih rasional akan menimbang-nimbang seberapa besar kemampuan masing-masing kandidat dalam mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Mereka akan memilih kandidat yang menawarkan pilihan terbaik. Pemilih rasional biasanya melihat sisi ini sebagai pertimbangan dalam memilih calon legislatif.

Selain itu, faktor primordialitas (ikatan kedaerahan) juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih. Banyak pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon legislatif karena dia berasal dari daerah yang sama dengan pemilih.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (42 tahun) berpendapat sebagai berikut.

“Saya tahunya caleg dari Desa Trangkil, jadi saya memilih caleg yang sederhana dengan saya kan lebih baik yang terpilih caleg dari daerah sendiri daripada daerah lain” (wawancara tanggal 9 April 2009).

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Sudarsono memilih calon legislatif yang sederhana dengannya selain karena yang diketahui calon legislatif dari daerah Desa Trangkil juga ketidakrelaan apabila yang terpilih nantinya calon legislatif dari daerah lain.

Pemilihan umum selalu pula ramai dengan janji-janji politik, namun tidak selalu janji politik itu dapat mempengaruhi pandangan seseorang. Realitas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan rakyat pemilih yang pada umumnya rendah dan tidak mampu mengerti program-program yang jelimet dan bersifat akademis. Mereka akan lebih mudah dipengaruhi oleh janji-janji yang menggiurkan walaupun tidak realistis. Pemilihan yang berdasarkan kharismatik dan popularitas individu, memang tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Martono (34 tahun) berpendapat.

“Selain sudah tertarik dengan caleg tersebut juga menurut saya cukup populer di masyarakat jadi kan pendukungnya banyak. Selain itu dia dari Partai Demokrat yang ada sosok SBY yang kharismatik” (wawancara tanggal 12 April 2009).

Dari pernyataan Bapak Martono tersebut menyatakan bahwa dia memilih calon anggota legislatif pilihannya berdasarkan kharismatik

seseorang yaitu terlihat dari ketertarikannya dengan caleg pilihannya juga sudah yakin bahwa caleg pilihannya itu cukup populer di masyarakat dan pendukungnya banyak. Selain itu Bapak Martono memilih calon legislatif dari Partai Demokrat yang ada sosok SBY yang kharismatik.

Ikatan emosional juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Ikatan emosional tidak mudah dipengaruhi dan diubah. Program-program kampanye pemilu yang paling bagus pun sulit sekali menarik perhatian pendukung calon legislatif yang memiliki ikatan emosional kuat.

Seperti yang dinyatakan oleh responden yang bernama Mahmud (45 tahun) sebagai berikut.

“Saya akan mendukung caleg pilihan saya dan sudah menjadi pendukungnya dari dulu karena caleg tersebut adalah teman dekat saya yang sering membantu saya jadi sebagai balas budi saya memilihnya” (wawancara tanggal 10 April 2009).

Berdasarkan pernyataan Bapak Mahmud jelas kiranya bahwa beliau menjatuhkan pilihannya pada calon legislatif yang didukungnya sejak dulu karena calon legislatif pilihannya itu adalah teman dekatnya yang sering membantu jadi sebagai balas budi beliau memilih calon legislatif tersebut. Bapak Mahmud akan mendukung calon legislatif tersebut, karena ikatan emosional kuat yang melekat pada dirinya meskipun iklan bersliweran dan spanduk memenuhi bahu jalan.

Selain pendapat yang telah dikemukakan oleh Bapak Mahmud tersebut, ikatan emosional dapat pula muncul karena faktor orientasi agama yang juga memiliki pengaruh terhadap pilihan pemilih. Sebagian

besar masyarakat Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah pemeluk agama Islam. Meskipun pada pemilu legislatif 2009 partai politik berbasis dan berasas agama tidak begitu mendapat perhatian yang cukup banyak dari masyarakat, namun masih ada pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pada faktor ikatan emosional yang kuat karena merasa seagama dengan pemilih.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudarsono (42 tahun) mengemukakan sebagai berikut.

”Saya akan tetap mendukung caleg pilihan saya yaitu caleg yang berasal dari partai politik yang berasas Islam (Partai PKNU), caleg itu adalah tokoh politik juga kyai sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya selain saya berjuang tidak untuk negara saja tetapi untuk agama juga” (wawancara tanggal 9 April 2009).

Dari pernyataan Bapak Sudarsono tersebut tampak bahwa beliau memilih caleg pilihannya dari partai politik yang berasas Islam (Partai PKNU), selain calon legislatif itu adalah tokoh politik juga seorang kyai. Menurutnya dengan memilih calon legislatif tersebut selain berjuang untuk negara juga berjuang untuk agamanya.

Dari hasil wawancara terlihat pula faktor pengaruh keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Di dalam keluarga yang seperti ini biasanya didominasi oleh kepala keluarga atau yang dituakan dalam keluarga. Individu yang berpengaruh ini mengarahkan anggota keluarganya pada satu pilihan calon legislatif tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh responden yang bernama Kiki (18 tahun) menyatakan sebagai berikut.

”Saya memilih calon anggota DPRD pilihan saya itu karena ada pengaruh dari ayah saya, jadi saya ikut saja pilihan ayah saya tersebut” (wawancara tanggal 10 April 2009).

Dari pernyataan Kiki tersebut dapat diketahui bahwa ia memilih kandidat pilihannya itu karena ada faktor pengaruh dari keluarga, yaitu ayahnya. Ia memilih calon legislatif pilihannya berdasarkan pengaruh dari ayahnya.

Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab sulitnya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai pemilih yang cerdas. Salah satu contoh, masih banyaknya kasus-kasus pembagian uang, sembako atau bentuk lainnya kepada masyarakat dan mereka menerimanya bukan karena tertarik dengan program partainya, tetapi tertarik pada materi yang didapatnya dari tim sukses calon legislatif yang menginginkan bahwa pemilih nantinya pada saat hari pemilu legislatif tiba akan memilih calon legislatif tersebut. *Money politics* yang dilakukan untuk *vote buying* menunjukkan betapa partai dan kandidat sangat kreatif dalam melakukan *money politics*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratna (29 tahun) sebagai berikut.

“Saya juga butuh uang dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan apabila ada pemilihan, para kandidat membagi-bagikan uang dan sebagai balasannya saya memilih caleg tersebut” (wawancara tanggal 11 April 2009).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Ratna yang tingkat pendidikannya SD, beliau memilih calon legislatif karena *money politics*. Faktor ekonomi menjadi alasan menerima uang tersebut dan

sebagai balasannya dia memilih calon legislatif yang memberi uang kepadanya itu.

4. Preferensi terhadap Partai Politik

Dalam kehidupan masyarakat banyak terlihat individu warga negara yang ramai mendirikan organisasi politik, melakukan kampanye di jalan, lapangan, televisi, radio, koran serta melalui spanduk, umbul-umbul, leaflet dan lain-lain. Para pengurus ataupun aktivis ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi calon legislatif DPD, DPRD baik tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi serta DPR RI. Semua bentuk aktivitas itu disebut dengan pesta demokrasi yang memiliki keinginan berkuasa melalui partai politik.

Kehadiran puluhan partai politik peserta pemilihan umum akan memberikan warna ideologis yang kental di dalam masyarakat. Beberapa perubahan kondisi yang melatarbelakangi gerak partai politik menyongsong pemilu 2009 tentu saja menarik untuk diikuti. Perubahan kondisi itulah yang juga membuat banyak kalangan masyarakat tertarik untuk mengikuti perkembangan partai politik pilihannya. Seperti yang diungkapkan responden yang bernama Hartatik (33 tahun) mengatakan sebagai berikut.

”Saya tertarik untuk selalu mengikuti perkembangan berita tentang pemilu dan partai politik yang saya sukai apabila menonton televisi pada malam hari selain itu juga sering membaca surat kabar apabila ada waktu luang” (wawancara tanggal 12 April 2009).

Dari pernyataan Ibu Hartatik menunjukkan bahwa ia merasa tertarik untuk selalu mengikuti perkembangan tentang pemilu dan partai politik yang disukainya melalui tayangan berita di televisi pada malam hari dan juga ketika membaca surat kabar.

Pemahaman masyarakat mengenai partai politik peserta pemilu 2009 salah satunya yaitu memahami visi dan misi partai politik. Visi dan misi dari seorang kandidat atau sebuah partai politik merupakan beberapa elemen yang dapat menunjukkan kondisi masyarakat seperti apa yang ingin diwujudkan. Namun, pernyataan mengenai hal itu sebaiknya tidak hanya berhenti dalam kalimat yang tertuang melalui slogan-slogan saja. Akan tetapi, agar mendapatkan kepercayaan dari pemilih, pernyataan tersebut nantinya akan diwujudkan dalam tindakan riil. Hal tersebut seperti yang diungkapkan responden yang bernama Nur Endah (25 tahun) sebagai berikut.

”Secara umum visi dan misi dari semua partai politik peserta pemilu bagus, hampir semua partai politik mengatakan akan berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Namun, visi dan misi itu akan lebih bagus lagi apabila diwujudkan nantinya” (wawancara tanggal 11 April 2009).

Dari pernyataan Nur Endah tersebut tampak bahwa visi dan misi dari semua partai politik secara umum bagus yaitu mengupayakan kesejahteraan rakyat. Namun, visi dan misi dari sebuah partai politik akan lebih bagus lagi apabila diwujudkan dalam tindakan nyata nantinya.

Keberadaan partai politik tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi, sebab dengan demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan

rakyat, sedangkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan itu secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan. Disinilah tampak peran partai politik sebagai sarana mengorganisasikan dukungan masyarakat dalam pemilu untuk menempatkan wakil-wakilnya. Dengan demikian, wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan mencerminkan ragam dukungan yang ada dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga DPRD Kabupaten Pati. Untuk mengetahui pemahaman mengenai partai politik diantaranya juga perlu mengetahui profil tokoh-tokoh yang dicalonkan menjadi calon anggota legislatif oleh partai politik. Berdasarkan hasil penelitian hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui profil para calon legislatif dari suatu partai politik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar responden menyatakan kurang mengetahui profil tokoh-tokoh yang dicalonkan menjadi calon anggota legislatif oleh partai politik. Contohnya adalah pendapat dari Tono (23 tahun) sebagai berikut.

“Saya hanya mengetahui sebagian kecil saja terutama caleg yang sederhana dengan saya, sedangkan yang dari luar daerah saya tidak tahu karena terlalu banyaknya kandidat yang ada” (wawancara tanggal 10 April 2009).

Dari pernyataan tersebut ia mengatakan bahwa hanya mengetahui profil-profil calon legislatif sebagian kecil saja terutama yang dari daerah Desa Trangkil, sedangkan yang dari daerah luar Desa Trangkil tidak

mengetahui karena banyaknya kandidat yang diusung oleh partai politik peserta pemilu.

Pemahaman mengenai partai politik memang sangat dibutuhkan pemilih untuk menganalisis partai politik mana yang benar-benar mampu mengemban amanat rakyat. Namun demikian, dari hasil wawancara dengan responden tidak semua responden memilih calon legislatif dari partai politik yang disukainya. Artinya, bahwa belum tentu pemilih yang paham mengenai partai politik yang disukainya akan memilih calon legislatif dari partai politik tersebut. Seperti pendapat responden yang bernama Sumarlan (47 tahun) sebagai berikut.

“Sebenarnya saya suka dengan partai Golkar, tetapi tidak suka dengan calegnya. Jadi, saya pilih saja caleg pilihan saya meskipun tidak berasal dari partai politik yang saya sukai tersebut karena pada pemilu legislatif 2009 ini bukan partai politiknya yang dipilih tetapi langsung memilih calon legislatifnya” (wawancara tanggal 9 April 2009).

Pendapat Bapak Sumarlan tersebut menyatakan bahwa beliau menjatuhkan pilihannya pada calon legislatif bukan dari partai politik yang dia sukai yaitu partai Golkar, karena menyukai partai politikya tetapi tidak dengan kandidat partai politik tersebut. Responden yang berprofesi sebagai guru ini sejak dulu sudah menyukai partai Golkar. Pada pemilu legislatif 2009 ini bukan lagi memilih partainya tetapi memilih secara langsung calon legislatifnya. Sehingga beliau memilih calon legislatif yang menurutnya lebih berbobot dan berkualitas dilihat dari program yang ditawarkan saat kampanye.

Banyak hal yang dapat dilakukan partai politik peserta pemilu untuk menarik simpati masyarakat pemilih (*voters*). Ada partai politik yang gencar melakukan sosialisasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Tetapi, sosialisasi melalui media elektronik seperti televisi lebih banyak menjadi pilihan partai politik peserta pemilu sebab dengan sarana ini lebih mengena atau mencapai sasaran. Televisi adalah media hiburan sekaligus media pendidikan yang murah dan hampir dimiliki oleh semua kalangan masyarakat.

Ajang pemilihan umum adalah masa panen bagi media massa untuk memperoleh pendapatan dari iklan. Salah satu partai politik yang aktif menggunakan iklan TV adalah Gerindra, yang merupakan partai politik baru dengan figur Prabowo Subianto. Dengan bantuan iklan rutin di sejumlah media, dapat dikatakan hampir semua orang mengenal partai berlambang kepala garuda itu. Gerindra memang menggunakan hampir semua stasiun televisi nasional untuk beriklan dengan sangat gencar. Sosialisasi partai politik dimanfaatkan dengan baik oleh partai-partai politik.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu responden yang bernama Karyadi (30 tahun) menyatakan sebagai berikut.

“Saya suka iklannya yang ditayangkan di televisi berkali-kali, bahkan banyak sekali dalam setiap harinya sebelum menjelang hari pemilu” (wawancara tanggal 11 April 2009).

Dari pernyataan Bapak Karyadi tersebut ia mengatakan bahwa sosialisasi partai politik Gerindra yang disukainya banyak sekali melalui

iklannya yang ditayangkan di televisi setiap hari sebelum menjelang hari pemilihan umum.

Pendapat lain dikemukakan oleh responden yang bernama Kiki (18 tahun) berpendapat sebagai berikut.

“Sosialisasinya kepada masyarakat diantaranya kampanye untuk menarik massa dengan membagi-bagikan kaos, stiker, kalender kepada masyarakat selain itu juga poster-poster gambar partai beserta calegnya yang ditempel dimana-mana terutama di pinggir jalan yang banyak dilewati orang” (wawancara tanggal 10 April 2009).

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi partai politik yang dilakukan tidak hanya melalui iklan di televisi namun dengan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yaitu melalui kampanye, selain itu juga membagi-bagikan kaos, stiker, kalender serta poster-poster gambar partai beserta calon legislatifnya ditempel dimana-mana, misalnya di tempat maupun jalan strategis yang banyak dilewati orang.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemilih terhadap Calon Anggota DPRD

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya sedikit banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk memahami mengapa pemilih cenderung lebih memilih calon legislatif "X" daripada "Y". Dari hasil penelitian terlihat bahwa ada beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati.

a. Rasionalitas

Sebagai pemilih yang rasional dalam menentukan pilihannya didasarkan pada program yang ditawarkan seorang calon legislatif yang nantinya akan dipilih. Pemilih rasional akan memilih kandidat yang ia dukung berdasarkan janji dan harapan yang mereka berikan sewaktu periode kampanye pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Firmanzah (2008:226) pemilih rasional akan menimbang-nimbang dan mengukur seberapa besar kemampuan masing-masing kandidat dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat. Mereka akan memilih kandidat yang menawarkan pilihan terbaik. Atau paling tidak mereka akan menjatuhkan pilihan pada pihak yang mampu menanamkan keyakinan bahwa mereka memang layak untuk dipilih. Kompetensi calon dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat akan menjadi pijakan utama pemilih dalam menentukan pilihannya.

Berdasarkan wawancara pada bulan April 2009 dengan masyarakat Desa Trangkil dapat diketahui partisipasi politik mereka. Sudijono Sastroatmodjo (1995:78) berpendapat bahwa kegiatan partisipasi politik itu meskipun kelihatannya hanyalah menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye.... Sebagian responden yang memilih calon legislatif dengan alasan rasional, mereka memilih

calon legislatif pilihannya atas dasar pertimbangan rasional. Pada masyarakat yang memiliki pilihan politik rasional sudah tentu akan melihat tawaran program yang cukup bagus dan melihat sejauh mana para calon legislatif tersebut layak untuk duduk di pemerintahan. Pernyataan kontestan pemilu yang beraroma surgawi seperti masyarakat akan mendapatkan cukup pendidikan, cukup pangan, penegakan hukum serta pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ternyata cukup mendapatkan perhatian untuk mempengaruhi pemilih rasional dalam menentukan pilihannya.

b. Primordialitas

Ikatan kedaerahan juga nyata-nyata masih merupakan untuk pemikat yang penting. Banyak pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat hanya karena dia berasal dari daerah yang sama dengan para pemilih (Firmanzah, 2008:233).

Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian, beberapa responden yang peneliti wawancarai mengemukakan bahwa lebih baik memilih calon legislatif yang berasal dari Desa Trangkil daripada memilih calon legislatif dari daerah lain serta karena ketidakrelaan apabila anggota legislatif yang terpilih tersebut berasal dari daerah lain mengalahkan pertimbangan rasional akan kemampuan individu.

c. Mitos dan Simbol

Mitos yang dimaksud dalam kaitan ini adalah semua hal yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu atribut individu atau

organisasi yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Mitos tumbuh dan berkembang karena digunakannya simbol-simbol yang menopang mitos tersebut. Simbol-simbol ini merupakan instrumen yang mutlak harus ada agar mitos bersangkutan dapat tetap terjaga (Firmanzah, 2008:231). Misalnya, kharismatik seorang tokoh dalam suatu partai politik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini memiliki pengaruh dalam mendongkrak perolehan suara.

Untuk memenangkan pemilu, para politisi berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat melalui kampanye. Pada saat kampanye politisi memajang wajahnya yang kharismatik, memaparkan semua keunggulan yang dimilikinya dan menebar janji manis. Kharismatik yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang dianggap sebagai figur yang memiliki pengaruh dan jiwa kepemimpinan yang kuat, dimana semua harapan dan simbol-simbol kepartaian melekat dalam dirinya.

Menurut hasil penelitian, beberapa responden menyatakan bahwa memilih calon legislatif pilihannya karena adanya figur yang kharismatik dari partai politik tersebut. Partai-partai politik yang tidak memiliki figur populer dan kharismatik sulit untuk mendapatkan simpati masyarakat. Misalnya, Partai Demokrat yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden langsung mendapat suara tertinggi sebagai partai baru. Pemilih lebih melihat sosok atau figur SBY yang mempunyai kualitas serta daya

pikat pribadi mengagumkan dan ini mampu mengalahkan tokoh-tokoh nasional lainnya.

Hal tersebut sependapat dengan Syamsudin Haris (2007:27) yang menyatakan bahwa menurut beberapa narasumber fenomena kemenangan Partai Demokrat sesungguhnya tidak terlepas dari figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Popularitas SBY sebagai tokoh mirip dengan apa yang terjadi dengan Gus Dur dan Megawati, dua orang presiden sebelumnya. Mereka menjadi tokoh karena hasil reproduksi media yang terus-menerus. Gus Dur dicitrakan oleh media sebagai tokoh yang mendukung demokrasi, memperjuangkan hak-hak minoritas serta pikiran-pikirannya yang luar biasa mendorong modernisasi. Demikian juga Megawati, yang dicitrakan sebagai tokoh yang dipinggirkan oleh Orde Baru dan disia-siakan sebagai anak Soekarno.

d. Ikatan Emosional

Pada dasarnya pemilu merupakan kontrak politik antara rakyat dengan para calon legislatif. Siapa saja yang terpilih harus memenuhi janjinya. Bagaimanapun janji adalah hutang. Namun, bukan hal yang aneh apabila politisi ingkar janji. Dapat kita lihat janji-janji yang ditawarkan selalu menggiurkan seolah-olah kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Janji para politisi tersebut tidak ada ikatan hukumnya sehingga rakyat tidak bisa menggugat ketika janji tersebut tidak ditepati. Oleh karena itu, pemilih yang mempunyai hubungan

emosional kuat akan lebih memilih calon legislatif yang sudah didukungnya dari dulu daripada berpindah memilih calon legislatif lainnya meskipun ada kandidat-kandidat lain dengan janji-janji manis yang ditawarkannya. Seperti yang dikatakan oleh Firmanzah (2008:235) bahwa ikatan emosional tidak mudah dipengaruhi dan diubah.

Berdasarkan hasil wawancara, ada juga responden menyatakan bahwa yang mempengaruhi pilihannya dalam memilih calon legislatif karena faktor emosional. Ikatan emosional ini dapat timbul karena adanya hubungan kedekatan dengan pemilih. Misalnya, calon legislatif pilihannya adalah teman dekat pemilih. Pemilih sudah mengenal kandidat tersebut, jadi sulit sekali untuk mengubah pilihan pemilih. Pilihan karena faktor emosional ini akibat penilaiannya terhadap calon legislatif yang dipilih adalah sesuatu yang mutlak sehingga membentuk sikap fanatik terhadap individu lain.

Ikatan emosional juga dapat muncul karena adanya faktor orientasi agama. Salah satu responden menyatakan bahwa memilih calon legislatif pilihannya dari partai politik yang berbasas Islam (Partai PKNU), selain calon legislatif tersebut adalah tokoh politik juga seorang kyai. Menurutnya dengan memilih calon legislatif pilihannya itu berjuang tidak untuk negara saja tetapi juga berjuang untuk agama. Seperti pendapat Dadang Kahmad (2002:100) yang menyatakan bahwa bagi masyarakat berkembang, agama selalu menjadi komoditas politik

untuk menarik massa dan sumber isu untuk menarik simpati atau memojokkan suatu kelompok.

Selain hal tersebut, ikatan emosional ini dapat pula muncul karena adanya faktor pengaruh keluarga. Keluarga merupakan tempat yang efektif dalam pendidikan politik seseorang (memberikan pengetahuan, pemahaman serta menentukan sikap politik) sejak dini yang mana hal ini bisa berpengaruh terhadap sikap atau perilaku dan cara pandang politik dikemudian hari setelah memiliki hak politik. Di dalam keluarga yang biasanya mempengaruhi anggota keluarganya adalah kepala keluarga atau orang yang dituakan. Anggota keluarga dalam menentukan pilihannya mengikuti pilihan kepala keluarga atau orang yang dituakan tersebut dan hal ini masih terjadi dalam masyarakat sampai saat ini. Berdasarkan hasil penelitian ada salah satu responden yang menyatakan bahwa memilih calon legislatif pilihannya karena adanya pengaruh dari keluarga, yaitu dari ayahnya.

Padahal, seharusnya setiap individu dalam keluarga dapat menentukan pilihannya sendiri berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang baik. Dengan pengaruh dari keluarga yang demikian, memungkinkan pilihan tersebut tidak sesuai dengan hati nurani sehingga proses kontrol dari pemilih terhadap kinerja dari wakilnya menjadi berkurang karena hanya mengikuti keinginan dari salah satu pihak dalam keluarga.

e. *Money Politics*

Mendekati pemilu legislatif 2009 para calon legislatif berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Jalur hitam pun seperti *money politics* dilakukan semata-mata demi menarik perhatian masyarakat. Menurut Aruman (2009) menyatakan bahwa politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Hak suara kita dalam pemilu seakan diperjualbelikan. *Money politics* seperti halnya jual beli kesempatan dan kepercayaan antara rakyat dengan politisi yang biasanya berupa uang dari calon legislatif untuk rakyat agar lolos dalam pemilihan umum. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan pemilih yang mendapatkan uang akan memilih calon legislatif tersebut.

Akibat kebutuhan yang harus dipenuhi maka faktor *money politics* tidak terlepas dari alasan untuk menerimanya, karena uang tersebut dapat digunakannya sebagai uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang masih dirasakan kurang. Selain itu juga dapat dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Responden yang menerima uang dari calon legislatif adalah mereka yang tingkat pendidikannya masih rendah yaitu SD. Seperti yang diungkapkan beberapa responden yang menyatakan bahwa memperoleh sejumlah uang dari tim sukses calon legislatif dalam pemilu legislatif 2009. Warga yang berpendidikan tinggi seperti

guru menolak adanya pemberian uang yang dilakukan oleh beberapa calon legislatif karena apabila seorang yang baru mencalonkan diri saja sudah banyak mengeluarkan uang, maka apabila ia terpilih pasti akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya tersebut walaupun dengan cara yang kotor.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pernyataan dari beberapa responden tersebut sesuai dengan pendapat M Ridha Rasyid (2009) yang mengatakan bahwa tipe masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya dapat ditelusuri ke dalam empat model diantaranya adalah pemilih komersial. Pemilih komersial ini adalah kelompok pemilih yang menilai dengan pendekatan atau ukuran materi sebagai penentu pilihannya di bilik suara. Calon legislatif tidak boleh terlalu antusias untuk mendapatkan suara dari mereka karena pada kelompok ini berlaku prinsip lelang terbuka, yang paling banyak pemberiannya-lah yang akan mendapatkan suara.

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu legislatif 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati antara lain faktor rasional, primordialitas, mitos dan simbol, ikatan emosional serta *money politics*. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi pilihan pemilih adalah faktor primordialitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para responden. Faktor yang

paling banyak dikatakan oleh responden adalah faktor primordialitas. Selain itu, juga dapat dilihat dari hasil penghitungan suara tampak bahwa calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Trangkil perolehan suaranya dapat dikatakan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan calon legislatif dari daerah lain. Faktor primordialitas ini lebih mempengaruhi pemilih dengan alasan bahwa pemilih lebih baik memilih calon legislatif yang berasal dari daerah sendiri daripada memilih calon legislatif dari daerah lain serta karena ketidakrelaan apabila anggota legislatif yang terpilih tersebut berasal dari daerah lain.

2. Preferensi terhadap Partai Politik

Pemilu identik dengan perubahan bangsa. Perubahan adalah kata yang sering dilontarkan sebagian besar partai politik dan para calon anggota legislatif disertai janji-janji manis yang diusung selama kampanye berlangsung. Tidak mengherankan apabila sebagian besar insan perpolitikan menggunakan trik tersebut baik dalam kampanye di media massa maupun elektronik. Dari sisi kontestan pemilu, terdapat satu kata kunci yang perlahan dan pasti menjadi kata kunci dalam sistem politik sekarang ini yaitu persaingan. Persaingan adalah satu konsekuensi logis dalam demokrasi, dimana masing-masing kandidat bersaing untuk menyakinkan pemilih bahwa partai dan kandidat merekalah yang layak untuk dipilih dan keluar sebagai pemenang pemilu (Firmanzah, 2007:20).

Pada pemilu legislatif 9 April 2009 masyarakat harus jeli untuk memilih wakil rakyat. Kita harus dapat membedakan mana politisi yang benar-benar pintar atau yang hanya mengobral janji saja. *Background* partai politik atau calon legislatif harus diketahui terlebih dahulu. Masyarakat harus memahami hal tersebut supaya benar-benar memilih calon legislatif yang memang layak dan mampu mengemban amanat rakyat dan tidak mudah termakan janji-janji para politisi yang terlalu muluk-muluk dan tidak jelas realisasinya.

Pemahaman mengenai partai politik dan tokoh-tokoh yang diusungnya dalam peserta pemilu legislatif penting untuk diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa responden menyatakan bahwa mereka sering mengikuti perkembangan partai politik yang disukainya melalui media cetak maupun elektronik yang setiap harinya dibanjiri dengan berita tentang politik menjelang pemilu legislatif 2009. Bagaimanapun dinamika perkembangan partai politik adalah fakta dasar yang akan berguna bagi telaah perubahan politik di negeri ini.

Visi dan misi partai politik juga merupakan hal penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam rangka memahami suatu partai politik. Visi partai politik adalah tujuan jangka panjang partai politik. Visi adalah suatu pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan oleh partai politik. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat harus diberi gambaran dan kepastian tentang finalisasi perjuangan mereka. Terkadang visi ini bersifat lompatan besar (*quantum*

leap) dari struktur dan kondisi masyarakat sekarang ke mimpi yang ingin diwujudkan. Sehingga tidaklah mengherankan apabila banyak kalangan melihat visi partai politik sebagai sesuatu yang tidak rasional. Sedangkan misi menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada. Jadi, pendirian suatu partai politik seharusnya didahului oleh misi yang jelas tentang mengapa partai tersebut harus ada. Pernyataan misi partai (*mission statement*) ini juga memberikan gambaran tentang nilai dan faham yang dianutnya serta memberikan landasan bagi perjuangannya (Firmanzah, 2008:107).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tampak bahwa masyarakat Desa Trangkil kurang begitu memahami visi dan misi dari partai politik yang mereka sukai. Mereka hanya tahu partai politik tersebut secara garis besar saja. Dari hasil wawancara sebagian besar responden menyatakan tidak begitu mengetahui visi dan misi partai politik yang disukainya. Mereka tidak begitu memperhatikan visi dan misi dari sebuah partai politik dalam pemilu legislatif 2009.

Suara masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan partai politik. Partai politik menjadi *legitimate* (memiliki pengaruh dan diakui) atau tidak apabila partai politik tersebut memiliki suara dan menduduki kursi dalam lembaga legislatif. Untuk itu para peserta pemilu legislatif 2009 berlomba-lomba meraih dukungan pemilih dan berusaha untuk mensosialisasikan partai politik serta kandidat yang dicalonkannya guna memperoleh simpati massa pemilih. Sosialisasi partai ini penting sebab

menurut Novianto dan Al Chaldar melalui sosialisasi partai, masyarakat akan mengetahui seluk beluk partai yang hendak dipilih, baik visi, misi, platform maupun program partai yang akan mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan politiknya (Ngabiyanto dkk, 2006:152). Sosialisasi partai politik dan calon anggota legislatif merupakan langkah yang begitu krusial selain sosialisasi tata aturan pemilu kepada masyarakat karena dengan sosialisasi ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk membuat pertimbangan dan berfikir lebih mendalam siapa yang harus dipilih atau diberikan amanah untuk memperjuangkan aspirasinya.

Sosialisasi partai politik beserta calon legislatif yang dilaksanakan di Desa Trangkil secara umum terlihat baik, tidak ada kerusuhan yang begitu berarti. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya melalui media massa serta kampanye. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilakukan melalui media massa elektronik memainkan peranan strategis dalam mempengaruhi pilihan massa. Rata-rata responden memperhatikan iklan politik melalui tayangan televisi.

Seperti ungkapan Firmanzah (2008:28) yang menyatakan bahwa dunia politik juga ditandai dengan keterlibatan media dalam hiruk-pikuk berpolitik. Media dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu segala sarana yang terkait dengan penyampaian pesan, baik yang bersifat riil maupun simbolik dari institusi politik kepada masyarakat yang lebih luas. Media dalam hal ini dapat berupa TV, radio, majalah serta koran. Digunakannya media massa sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan ide, pesan dan

program kerja politik adalah karena kenyataan bahwa media dapat dipakai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.

Selain sosialisasi melalui media, kegiatan kampanye juga cukup mendapatkan perhatian untuk menarik massa pemilih. Kampanye adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi rakyat agar mereka menaruh simpati terhadap partai tertentu sehingga dengan itu diharapkan dalam memberikan suaranya nanti benar-benar menaruh tanda gambar yang dimaksud oleh masing-masing juru kampanye (Ngabiyanto dkk, 2006:172). Sedangkan menurut Lilleker & Negrine (2000) dalam Firmanzah (2007:268) menyatakan bahwa kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.

Kegiatan kampanye ini untuk menunjukkan secara langsung kepada masyarakat kekuatan yang dimiliki sebuah partai politik. Dalam kegiatan ini terlihat adanya orasi dan ajakan untuk memilih kandidat dari partai politik tersebut. Selain itu ada juga pembagian kaos kepada simpatisan yang mengikuti kampanye ini.

Selain kegiatan kampanye tersebut, sosialisasi partai politik juga dilakukan dengan penyebaran serta pemasangan stiker dan poster berisi slogan maupun gambar partai politik beserta calon legislatifnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfamiliarikan partai politik beserta calon

legislatifnya di mata pemilih. Stiker dan poster ini dipasang atau ditempel di pinggir atau tepi jalan maupun di pohon-pohon serta tembok-tembok rumah penduduk. Selain itu juga ada pemasangan spanduk di jalan-jalan yang banyak dilewati orang, agar masyarakat dapat melihat dengan jelas apa-apa yang tidak atau yang belum bisa tersampaikan dalam media lain atau untuk menegaskan apa yang disampaikan sebuah partai politik. Untuk mensosialisasikan sebuah partai politik dapat pula dilakukan melalui radio, televisi dan media cetak. Cara ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui program dan janji politik secara visual dan verbal. Cara ini juga diharapkan memudahkan masyarakat pemilih dalam mencerna dan memahami apa yang diusung oleh partai politik. Setiap partai politik memiliki hak yang sama dalam mensosialisasikan program dan janji politiknya melalui media cetak maupun elektronik. Cara atau strategi penyelesaian masalah kemasyarakatan yang diungkapkan oleh para calon legislatif atau promosi program dan janji politik menjadi acuan, jika nantinya pemilih menanyakan kembali penyelesaian dalam masyarakat.

Para tokoh-tokoh partai politik atau kandidat yang dicalonkan oleh partai politik juga penting untuk diketahui oleh pemilih. Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena pemilu adalah momentum yang baik untuk melakukan perbaikan atas negeri ini.

Dari hasil wawancara, beberapa responden menyatakan hanya sedikit mengetahui profil tokoh atau kandidat yang dicalonkan menjadi

anggota legislatif, terutama mereka hanya mengetahui calon legislatif yang berasal dari daerah Desa Trangkil. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya kandidat dalam satu daerah pemilihan yang diusung dari partai politik pada pemilu legislatif 2009. Selain itu, masih kurangnya calon legislatif yang secara langsung menemui masyarakat. Masyarakat umumnya mengetahui informasi tentang nama dan program calon legislatif melalui spanduk atau atribut kampanye lainnya.

Lebih lanjut Bartle dan Griffith (2001) dalam Firmanzah (2007:215) menyatakan bahwa profil pemilih terdiri dari tiga hal. Pertama, profil tentang pendukung partai politik. Karakteristik pendukung dan simpatisan perlu diketahui untuk memahami mengapa mereka menjadi pendukung. Karakteristik dasar seperti usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tujuan hidup, *life style*, nilai dan norma hidup pun perlu diketahui. Kedua, profil tentang massa mengambang. Berbeda dengan penyusunan profil pendukung, profil massa mengambang ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sekaligus karakteristik yang mendasarinya. Massa mengambang biasanya akan menunggu sampai berakhirnya periode kampanye dulu, baru setelah itu memutuskan kontestan mana yang akan dicoblos. Ketiga, profil tentang pendukung partai lain. Bahwa setiap kontestan pemilihan umum dituntut untuk memperbesar dukungan mereka. Tidak ada satu pun jaminan mengenai tidak adanya perilaku pengembosan dan penyeberangan pendukung ke partai lain. Sehingga satu sama lain, selain

memproteksi dukungan juga cenderung untuk merebut pendukung partai lain.

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa preferensi terhadap partai politik tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan. Masyarakat yang memahami partai politik yang disukainya belum tentu akan memilih calon legislatif dari partai politik tersebut. Artinya, belum tentu pemilih yang paham mengenai partai politik yang disukainya akan memilih calon legislatif dari partai politik tersebut karena kandidat partai politik yang disukai tidak begitu memikat hati pemilih untuk memilih calon legislatif dari partai politik yang disukai tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan responden yang mengatakan bahwa sejak dulu sudah menyukai partai Golkar, namun pada pemilu legislatif kali ini tidak lagi memilih partai kuning (Golkar) karena pada pemilu legislatif 2009 tidak lagi memilih partai tetapi memilih secara langsung orangnya. Sehingga beliau memilih calon legislatif yang menurutnya lebih berbobot dan berkualitas dilihat dari program yang ditawarkan saat kampanye meskipun bukan berasal dari partai yang disukainya tersebut. Pada pemilu legislatif 2009 bukan lagi memilih partai, namun memilih secara langsung calon legislatifnya sehingga pemilih akan lebih selektif lagi dalam memilih kandidat partai politik peserta pemilu. Jadi, preferensi terhadap partai politik tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai

politik yang bersangkutan pada pemilu legislatif 2009 yang dilaksanakan di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilu 2009 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati antara lain:
 - a. Rasionalitas artinya pemilih dalam menentukan pilihannya didasarkan pada program yang ditawarkan seorang calon legislatif yang ia dukung maupun berdasarkan janji dan harapan yang mereka berikan sewaktu periode kampanye pemilu. Misalnya, pernyataan kontestan pemilu seperti masyarakat akan mendapatkan cukup pendidikan, cukup pangan, penegakan hukum serta pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ternyata cukup mendapatkan perhatian untuk mempengaruhi pemilih rasional dalam menentukan pilihannya.
 - b. Primordialitas artinya pemilih menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat yang berasal dari daerah yang sama dengan para pemilih yaitu calon legislatif yang berasal dari Desa Trangkil.
 - c. Mitos dan simbol, dimana pemilih tertarik untuk memilih calon legislatif yang memiliki figur kharismatik dari sebuah partai politik. Misalnya, Partai Demokrat yang sukses mengusung Susilo Bambang

Yudhoyono sebagai calon presiden mampu memikat hati pemilih cukup banyak. Pemilih lebih melihat sosok atau figur SBY yang mempunyai kualitas serta daya pikat pribadi mengagumkan dan ini mampu mengalahkan tokoh-tokoh nasional lainnya.

- d. Ikatan emosional, dimana pemilih dalam menentukan pilihannya tidak mudah dipengaruhi dan diubah meskipun ada program-program kampanye pemilu yang paling bagus pun sulit sekali menarik perhatian pendukung calon legislatif yang memiliki ikatan emosional kuat. Ikatan emosional ini dapat timbul karena adanya hubungan kedekatan dengan pemilih. Misalnya, calon legislatif pilihannya adalah teman dekat pemilih. Selain itu, ikatan emosional juga dapat muncul karena faktor orientasi agama. Pemilih memilih calon legislatif pilihannya dari partai politik yang berbasas Islam (Partai PKNU), selain calon legislatif tersebut adalah tokoh politik juga seorang kyai. Pengaruh keluarga juga turut mempengaruhi pemilih yang juga termasuk ikatan emosional ini. Di dalam keluarga yang biasanya mempengaruhi anggota keluarganya adalah kepala keluarga atau orang yang dituakan.
- e. *Money politics*, dalam hal mana pemilih memberikan hak suaranya kepada calon legislatif pilihannya karena tertarik dengan materi yang didapatnya dari tim sukses calon legislatif yang dipilihnya. Faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah menjadi penyebab alasan menerima uang tersebut.

Sedangkan faktor yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi pilihan pemilih adalah faktor primordialis. Dengan alasan bahwa pemilih lebih baik memilih calon legislatif yang berasal dari daerah sendiri daripada memilih calon legislatif dari daerah lain serta karena ketidakrelaan apabila anggota legislatif yang terpilih tersebut berasal dari daerah lain.

2. Preferensi terhadap partai politik tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan. Pemilih yang memahami partai politik yang disukainya belum tentu akan memilih calon legislatif dari partai politik tersebut. Artinya, belum tentu pemilih yang paham mengenai partai politik yang disukainya akan memilih calon legislatif dari partai politik tersebut. Misalnya, ada responden yang sejak dulu sudah menyukai partai Golkar, namun pada pemilu legislatif kali ini tidak lagi memilih partai tersebut karena pada pemilu legislatif 2009 tidak lagi memilih partai tetapi memilih secara langsung calon legislatifnya. Jadi, preferensi terhadap partai politik tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon legislatif dari partai politik yang bersangkutan pada pemilu legislatif 2009 yang dilaksanakan di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut ini:

1. Masyarakat hendaknya dapat menentukan pilihannya dalam pemilu menjadi pemilih yang cerdas yaitu dapat membedakan mana politisi yang benar-benar pintar atau yang hanya mengobral janji saja serta tidak mudah termakan janji-janji para politisi yang terlalu muluk-muluk dan tidak jelas realisasinya.
2. Bagi partai politik, hendaknya masyarakat bukan hanya dieksploitasi suaranya tetapi juga dipahamkan tentang politik dan lingkungannya. Partai politik senantiasa meningkatkan perannya dalam sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat agar menyadari pentingnya memberikan partisipasi politik diantaranya melalui penggunaan hak suara yang dimiliki dengan baik sehingga partai politik tidak hanya mengarah pada kemenangan partainya saja dalam pemilu.
3. Bagi media informasi baik cetak maupun elektronik hendaknya memanfaatkan media informasi tersebut dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kecerdasan serta kesadaran politik masyarakat dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daryanto, SS. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2008. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*. Jakarta: Visimedia.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia (Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten/Kota)*. Jakarta: LIPI.
- Herna Susanti, Martien. 2007. *Paparan Kuliah: Etika Politik*. Semarang: UNNES.
- Huberman, Michael dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mahfud M D, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngabiyanto, dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.

- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Aruman. 2009. *Sorry! It's Sales, Not Marketing*. <http://mix.co.id>. (23 Februari 2009).
- Rasyid, M Ridha. 2009. *Kontroversi Pemilu 2009*. <http://www.kendariexpres.com>. (16 April 2009).